

## **POLITIK PENDIDIKAN DALAM ADAPTABILITAS MAHASISWA ILMU PEMERINTAHAN FISIP UPR DALAM MEMENUHI KULIAH DARING DI MASA PANDEMI COVID 19**

**Oleh:**

**Purnama Julia Utami<sup>1</sup>, Yunita Asmawati<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Dosen Jurusan Ilmu pemerintahan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Palangka Raya

Email: <sup>1</sup>pjutami@fisip.upr.ac.id

<sup>2</sup>yunitaasmawati@fisip.upr.ac.id

### **ABSTRAK:**

Covid 19 merupakan tonggak perubahan pendidikan di Indonesia. Sebelum Covid 19 tiba, pendidikan umumnya dilakukan dengan cara konvensional yaitu tatap muka, namun Pandemi Covid 19 yang telah melanda dunia pendidikan sejak Maret 2020 secara drastis merubah metode pembelajaran menjadi daring. Artikel ini akan menguraikan tentang bagaimana pandemi covid 19 membawa perubahan proses positif yang dapat disesuaikan bagi dosen dan mahasiswa dalam memenuhi dan menyelesaikan kuliah daring selama satu tahun. Penulis akan fokus pada perjuangan dosen dan mahasiswa dalam menyelesaikan birokrasi beserta tanggung jawabnya serta kemampuan dan keterbatasan mahasiswa dalam memenuhi perkuliahan. Argumentasi utama dari makalah ini adalah melihat bagaimana perkuliahan daring nampak lebih kompleks. Meski begitu, birokrasi harus tetap berjalan, meski dengan fasilitas yang minim. Alhasil, akan terjadi negosiasi antara birokrasi, pendidik, dan siswa dalam memperkuat eksistensinya.

*Kata Kunci: Politik Pendidikan, Covid 19, Adaptasi, FISIP UPR*

### **ABSTRACT:**

Covid 19 is a milestone in the changes to the configuration of education in Indonesia. Before Covid 19 arrived, education was carried out using the traditional method of face-to-face, however, The Covid has hit education since March 2020 by changing the basic offline method of learning to virtually. This article will elaborate on how covid 19 brings some adaptable process changes for lecturers and students in fulfilling and completing virtual lectures for a year. The author will focus on the struggle of lecturers and students in completing bureaucracy as their responsibilities as well as the abilities and the limitations of students in fulfilling lectures. In contrast to the offline method of learning, the main argument from this paper is how that lectures will be more expensive along with the only using virtually. Still, the bureaucracy must be continuing the education processes, even though with the minimally facilities. As a result, there will be negotiations between bureaucracy, educators, and students in strengthening their existence.

*Keywords: Politics of Education, Covid 19, Adaptability, FISIP UPR*

## PENDAHULUAN

### 1. Latar belakang

Pandemi Covid 19 merupakan tonggak perubahan sistem pendidikan yang ada di Indonesia yang sekaligus memberikan dampak positif bagi Universitas Pertama dan Tertua di Kalimantan Tengah, Universitas Palangka Raya. Transisi perubahan pada ekosistem pendidikan dengan dikeluarkannya kebijakan untuk bekerja dan belajar dari rumah secara otomatis merubah aktivitas pembelajaran dari awalnya tatap muka menjadi daring dengan memanfaatkan internet dan teknologi dengan didasarkan pada kesiapan individu untuk memberi dan menerima perkuliahan.

Setidaknya dalam dua semester perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangkaraya, tenaga pendidik dan mahasiswa didik berjuang dengan keras untuk mengikuti petunjuk dari Kementerian Pendidikan. Kemudian di Implementasikan ke dalam unit yang lebih kecil melalui Himbuan dan Pada tanggal 16 Maret 2020, Rektor Universitas Palangka Raya memutuskan bahwa seluruh kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di lakukan dengan daring. Asumsi utama dari kegiatan belajar mengajar adalah transfer knowledge, dimana proses transfer ilmu pengetahuan dari dosen kepada mahasiswa tidak hanya dilakukan melalui ceramah, dan tugas.

Pandemi Covid 19 ini kemudian memberikan peluang dan tantangan bagi dosen untuk mengembangkan diri dan berkreasi, namun bagi mahasiswa hal tersebut dapat dipandang sebagai bencana. Mayoritas mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya berasal dari daerah terpencil dimana akses internet dan akses listrik sangat terbatas. Sehingga kondisi ini menyulitkan mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran. Namun disisi lain, hal ini merupakan kesempatan bagi mahasiswa untuk

mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih luas dari media sosial namun juga dapat memicu lembaga pendidikan menghadapi kebangkrutan karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi.

Universitas Palangka Raya sebagai lembaga merupakan representasi dari interaksi yang terjadi dalam lingkungan perguruan tinggi. Interaksi antara universitas sebagai pemerintah dan mahasiswa yang diperintah merupakan perilaku politik. Kemudian ketika hal ini dicermati lebih jauh dapat menjadi penelaahan dari terminologi politik yang memiliki makna 'publik'. Sehingga jika diterjemahkan memiliki makna untuk mewujudkan kebaikan bersama dalam rangka memenuhi mandat demokrasi.

Namun dalam perjalannya cukup banyak yang harus di akselerasi berkaitan dengan kebijakan yang ditetapkan ini, Dosen dan Mahasiswa masih cenderung gagap untuk melaksanakan perkuliahan daring yang terbuka, terstandar dan terstruktur. Pembinaan sistem pendidikan yang cenderung mengarah kepada pendidikan terbuka memaksa Dosen dan mahasiswa untuk cepat. Selain itu juga tuntutan kepekaan dan tanggap dalam menghadapi dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai bagian dari ekosistem pendidikan.

Definisi:

Politik pendidikan memiliki makna kebijakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh lembaga pendidikan untuk tetap melaksanakan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pendidikan.

### 2. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan artikel dengan metode campuran konkuren ini untuk menjawab persoalan bagaimana politik pendidikan mempengaruhi mahasiswa Jurusan Ilmu

Pemerintahan Fisip UPR dalam beradaptasi memenuhi kuliah daring di masa pandemi covid 19.

### 3. Metode Penelitian

Metode penelitian mencakup prosedur dan teknik penelitian dan merupakan langkah yang substansial untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan *mix methods* dengan strategi kongkuren (*Concurrent Mixed Methods*). Instrumen-instrumen kuantitatif akan digunakan untuk mengukur tingkat adaptasi mahasiswa sebagai variabel bebas dan lembaga sebagai variabel terikat. Pada waktu bersamaan fenomena politik pendidikan di ranah jurusan dieksplorasi dengan menggunakan observasi kualitatif. Pengombinasian kedua macam data kualitatif dan kuantitatif ini untuk memahami masalah penelitian dengan mengkonvergensi angka pada data kuantitatif dan pandangan deskriptif pada kualitatif.

Subjek penelitian adalah mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UPR. Pengumpulan data menggunakan kuesioner daring dan yang terdiri atas 4 buah pertanyaan terstruktur dan 4 pernyataan yang diukur menggunakan skala likert. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan Triangulasi, dan untuk validitas satu akun email hanya dapat mengisi kuesioner sebanyak 1 (limit respons).

Pengumpulan informasi berkaitan dengan bagaimana adaptabilitas Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UPR menyesuaikan diri terhadap kondisi dan situasinya dalam memenuhi kuliah daring sebagai kewajiban pemenuhan perkuliahan daring di masa Pandemi Covid 19. Melalui penelitian ini penulis ingin mengukur keterkaitan antara kebijakan yang berikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan realitas pemenuhan perkuliahan daring di lingkup Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UPR.

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan objek penelitian yang digunakan

sebagai sumber data yang mewakili karakteristik dari tema yang ditetapkan. Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan yang mengisi kuesioner penelitian dan berpartisipasi aktif dalam perkuliahan dengan segala dinamikanya pada Bulan Maret 2020 sd Desember 2020.

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari referensi dan informasi yang terdokumenasi melalui siacad oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya. Data sekunder yang diperlukan antara lain data jumlah mahasiswa aktif yang mengikuti mata kuliah pada semester Genap 2019/2020 dan Semester ganjil 2020/2021. Responden dalam penelitian ini adalah 300 Orang mahasiswa yang terbagi dalam 2 Semester Perkuliahan (Ganjil 2019/2020 dan Genap 2020/2021). Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya berupa tanggapan atau pendapat responden mengenai suatu permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Dalam hal ini data yang diambil berupa bagaimana adaptabilitas mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan dalam memenuhi perkuliahan daring. Hasil Kuesioner dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif, dengan penggunaan rumus persentase dalam bentuk deskriptif.

## KERANGKA KONSEP

### 1. Politik Pendidikan

Sebagaimana dalam kajian politik, negara dipandang sebagai sumber utama yang secara sah dapat menggunakan paksaan untuk masyarakatnya, oleh karenanya politik dipandang sebagai sebuah persaingan untuk membagi kekuasaan negara antar kelompok kepentingan dalam sebuah negara. Max Weber menyatakan bahwa Negara merupakan struktur organisasi yang kompleks, yang memiliki fungsi dan tugas yang berbeda. Pendekatan dominan dalam ilmu politik telah

meningkatkan minat ilmiah terhadap institusi<sup>vi</sup> dan mendorong perdebatan aktif tentang konsep sentral tertentu, seperti negara<sup>vii</sup>. Asumsi ilmu politik menyatakan bahwa masyarakat dan sistem politik mengandung bagian yang berbeda fungsi, namun setiap bagian tergantung sama lain dan cenderung stabil.

Oleh karenanya dalam artikel ini penulis mempersempit definisi politik sebagai sebuah gejala yang serba hadir dalam seluruh kegiatan manusia karena pada dasarnya manusia cenderung untuk menunjukkan eksistensinya sebagai bentuk representasi dari negara<sup>viii</sup>. Kemudian ditambah lagi politik cenderung menekankan pada kepentingan jangka pendek dan cenderung mengakomodir konstituennya dalam sukseki kepentingannya. Kebijakan politik cenderung berubah-ubah menyesuaikan rezim yang sedang memimpin.

Politik pendidikan dalam kajian ini adalah sebuah terminologi kebijakan yang diuraikan oleh Fischer yaitu "whatever the government choose to do or not to do". Politik Pendidikan pada masa Menteri Nadiem Makarim cenderung membuka peluang kreatifitas pendidik dan mahasiswa, modernisasi dan akselerasi teknologi dikedepankan untuk membentuk bangsa indonesia yang berkarakter, adil dan beradab. Realitas kebijakan yang di lahirkan pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menjadi satu yang tidak dapat dipungkiri. Setidaknya, terdapat dua paket kebijakan di bidang pendidikan yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Keleluasaan bagi perguruan tinggi untuk dapat berinovasi dalam unit pendidikannya<sup>ix</sup>.

Prinsip kebijakan pendidikan di masa Pandemi Covid-19 adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum. Selain itu, mempertimbangkan tumbuh kembang

peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi Covid-19. Akan tetapi saat berjalannya kegiatan belajar mengajar dari rumah, penerapannya mengalami banyak sekali hal-hal yang lebih serius untuk diperhatikan. Sebagai contoh, terlihat perbedaan antara mahasiswa/i yang mampu dalam segi fasilitas belajar dengan mahasiswa/i yang bisa dikatakan belum cukup dalam hal fasilitas atau dengan kondisi kurang secara fasilitas belajar karena faktor perbedaaan sosial (Social Stratification), dan dalam hal lain yaitu perbedaan wilayah atau jarak, jaringan internet, dan bervariasi kesenjangan sosial.

Berangkat dari hal tersebut, dapat melihat ketimpangan sosial yang terjadi. Alasan terletak pada bagaimana sangat mudah bagi mahasiswa/i yang memiliki fasilitas lengkap dan cukup. Sehingga dengan cepat dengan mudah mengikuti proses pembelajaran serta mengakses kegiatan belajar mengajar yang minim halangan atau gangguan. Sebaliknya dengan mahasiswa/i yang kurang mampu, dengan berbagai keterbatasan akan menjadibatu hambatan dalam mengikutinkegiatan belajar mengajar. Berbeda halnya dengan kegiatan belajar mengajar yang berlangsung offline dikampus, belajar bersama tanpa membedakan kelas sosial.

## 2. Adaptasi

Adaptasi sosial merupakan sebuah prasyarat untuk mengelaborasi bagaimana manusia khususnya mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan sosial yang terjadi. Adaptasi dalam artikel ini cenderung bersifat sosial karena situasi dan kondisi yang memaksa ekosistem perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri terhadap situasi Pandemi Covid 19 yang terjadi.

Untuk pemahaman ilmiah tentang fenomena adaptasi sosial, kategori interaksi sosial menjadi semakin penting. Ketika

berinteraksi dengan berbagai kelompok sosial, individu mempelajari peran dan nilai sosial dari sistem sosial, secara obyektif berkontribusi pada perubahan sistem melalui penyebaran ide dan praktik baru. Hasilnya tidak hanya adaptasi individu dengan kondisi sosial, tetapi juga realisasi kebutuhan dan kepentingannya<sup>x</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

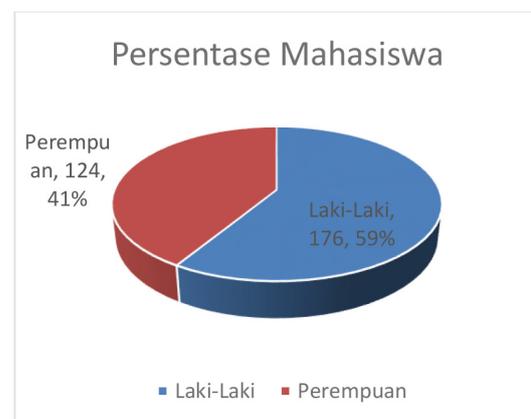
### 1. Realitas Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UPR dalam perkuliahan Daring

Sistem Pendidikan Jarak jauh merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru atau Dosen dan siswa atau Mahasiswa tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru atau Dosen harus memberikan kegiatan kepada siswa atau Mahasiswa agar belajar mengajar tetap berjalan, walaupun Mahasiswa berada di rumah saja. Dosen ditugaskan dapat membuat media Pendidikan sebagai cara utama dengan memanfaatkan jaringan internet.

Sebagaimana tujuan dari pendidikan Indonesia adalah melakukan pemerataan pendidikan namun dalam situasi kali ini tantangan yang muncul sungguh berat, terutama para mahasiswa yang berada di pedalaman Kalimantan Tengah dengan kondisi listrik dan sinyal internet yang minim. Lahirnya kebijakan pembelajaran jarak jauh ataupun daring mengakibatkan tantangan yang tidak mudah untuk diselesaikan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, terutama mahasiswa Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya.

Transisi pembelajaran tatap muka menjadi daring menimbulkan cukup banyak tantangan bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UPR, hal ini dapat dilihat dari 9 butir pertanyaan yang ada pada kuesioner daring yang penulis buat. Berdasarkan hasil survei 124 (41%) mahasiswi berjenis kelamin perempuan dan 176 (59%) mahasiswa berjenis kelamin Laki-Laki. Pertanyaan kedua

berkaitan dengan fasilitas belajar yang dimiliki oleh mahasiswa/i secara pribadi hasilnya adalah 176 (58%) mahasiswa memiliki dan menggunakan smartphone / gawai dalam mengikuti perkuliahan daring yang diadakan, 104 (35%) mahasiswa/i memiliki dan menggunakan laptop / komputer jinjing dalam melaksanakan perkuliahan dan hanya 20 (7%) mahasiswa yang memiliki fasilitas smartphone dan laptop. Kondisi ini merupakan realitas nyata yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan perkuliahan daring yang telah berjalan selama dua semester di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UPR.



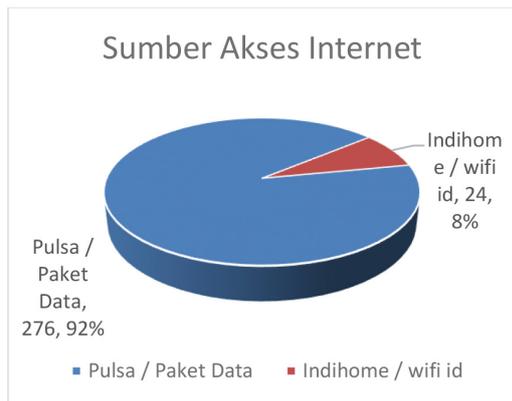
Gambar 1. Presentase Jumlah Mahasiswa berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 1 menunjukkan bahwa mahasiswa/i yang berpartisipasi dalam studi ini cenderung representatif 41% berjenis kelamin perempuan dan sisanya 59% berjenis kelamin laki-laki.



Gambar 2. Kepemilikan Fasilitas Belajar Daring

Gambar 2 menunjukkan bahwa mahasiswa/i yang berpartisipasi dalam studi ini hanya sebagian kecil yang memiliki laptop / komputer jinjing dalam memenuhi perkuliahan daring, dan sebagai informasi kuesioner ini di publikasikan pada tanggal 28 April 2020 saat instruksi pertama Pembelajaran Jarak Jauh di Implementasikan untuk pertama kalinya.



Gambar 3. Sumber Akses Internet Mahasiswa

Gambar 3, sedikit menjelaskan tentang sumber akses mahasiswa di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UPR berkaitan dengan sumber akses internet yang mereka miliki 276 (92%) masih mengandalkan pulsa atau paket internet dan sisanya 24 (8%) menggunakan layanan internet publik<sup>xi</sup> maupun private<sup>xii</sup>, upaya ini merupakan bentuk kesadaran mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan dalam mengikuti proses pelaksanaan perkuliahan daring di masa awal Pandemi Covid 19.



Gambar 4. Posisi mahasiswa saat Perkuliahan Daring 28 April 2020

Gambar 4 menjelaskan tentang lokasi mahasiswa saat kuesioner di sebar, mayoritas berada di Provinsi Kalimantan Tengah 213 (71%) mahasiswa, yang cenderung tersebar di seluruh kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah, 87 (29%) mahasiswa tersebar di beberapa bagian Indonesia seperti Sumatera Utara, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Pulau Jawa.

Selanjutnya Kuesioner Daring memberikan dua pernyataan berkaitan dengan kesanggupan kuliah daring mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UPR. Pengukuran yang dilakukan menggunakan skala Likert dengan penilaian skor 5= sangat setuju, skor 4= setuju, skor 3=netral, skor 2 = tidak setuju, skor 1= sangat tidak setuju. Berikut di bawah adalah hasil skor perhitungan kriterium dengan skala likert:

Tabel 1. Skor Kriterium Dengan Skala Likert

Rumus	Skor	Interval Jawaban	Skala
$5 * 300^{13}$	1500	1201-1500	SS
$4 * 300$	1200	901-1200	S
$3 * 300$	900	601 - 900	N
$2 * 300$	600	301- 600	TS
$1 * 300$	300	0 - 300	STS

Dari perhitungan skala likert di atas, maka respon dari para responden mengenai pernyataan yang diajukan oleh peneliti diperoleh jawaban dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel 2. Pernyataan Kuliah Daring di Masa Pandemi

Keterangan	STS	TS	N	S	SS
Frekuensi	10	20	100	124	46
Persentase	3,3%	6,6%	33,3%	41,3%	15,3%
Skor	10	40	300	496	230
Jumlah	1076				
Nilai Rata-Nata	3,58				

Berangkat dari poin pernyataan pertama yang berbunyi "Kuliah daring di masa pandemi Covid 19 merupakan pilihan yang efektif" dan 300 responden menyatakan setuju. Pernyataan

ini terlihat dari jumlah skor 1076 yang masuk dalam kriterium 2 dalam skala likert, dengan nilai rata-rata 3,58. Sehingga dapat dikatakan bahwa hal ini menjadi bukti bahwa responden cenderung setuju bahwa pembelajaran daring mampu mengurangi potensi penyebaran covid 19, yang merupakan tanggung jawab bersama sebagai warganegara. Adapun responden yang menyatakan Sangat Tidak Setuju sebesar 3,3 % merupakan responden yang memang secara finansial tidak mampu secara finansial untuk memenuhi perkuliahan daring<sup>xiv</sup>.

**Tabel 3. Fleksibilitas Kuliah Daring di Masa Pandemi**

Keterangan	STS	TS	N	S	SS
Frekuensi	30	12	68	150	40
Persentase	10%	4%	22,6%	50%	13,3%
Skor	30	24	204	600	200
Jumlah	1058				
Nilai Rata-Nata	3,52				

Poin pernyataan kedua berbunyi “Jam belajar kuliah daring cenderung fleksibel” dan mayoritas responden setuju. Hal ini dapat terlihat dari 50% responden atau 150 mahasiswa menyatakan bahwa perkuliahan daring memang jadwalnya cukup fleksibel dan bisa di jadwalkan kapan saja. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika perkuliahan dilaksanakan pada malam hari. Bahkan pada kadus lain, terdapat beberapa wilayah yang belum memiliki akses listrik selama 24<sup>xv</sup> jam membuat perkuliahan daring menjadi beban berat oleh mahasiswa. Realita bahwa di beberapa wilayah Kalimantan Tengah masih ada yang belum mendapatkan jaringan internet yang stabil dan listrik yang lancar menjadi persoalan yang krusial. Berbeda dengan kondisi pada awal pandemi, di mana partisipasi mahasiswa sangat aktif dalam pelaksanaan kuliah daring.

Perkuliahan daring pada masa Semester Genap 2019/2020 di salah satu jurusan pada

FISIP Universitas Palangka Raya menjadi satu aktor Lembaga yang mampu menuntut mahasiswa dan dosen untuk kreatif dalam mengeksplorasi kreativitasnya. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi perkuliahan dalam rangka menuntaskan tanggung jawab birokrasi yang ada pada tingkatan lembaga pendidikan tinggi. Selain itu data kuesioner online yang disebarluaskan cukup banyak menyadarkan penulis untuk dapat mengadopsi beberapa platform sekaligus agar dapat mengakomodir mahasiswa untuk melaksanakan perkuliahan secara daring. Melalui data empiris di lapangan dapat dibuktikan adanya kesulitan yang dihadapi mahasiswa Ilmu pemerintahan dengan berbagai macam kondisi. Beberapa kutipan deskripsi kondisi yang dihadapi mahasiswa di beberapa wilayah Kalimantan Tengah tersebut dapat dilihat berikut ini:

“Sinyal yang kadang hilang, jadinya setiap di adakan kuliah online seperti *zoom* dan *google meet* kadang materi yang di sampaikan tidak bisa tersampaikan dengan baik<sup>xvi</sup>”

Responden A5 berasal dari Kabupaten Gunung Mas, dan menurut data Siakad FISIP UPR lokasi responden sudah tercover jaringan namun masih sangat terbatas<sup>xvii</sup>.

“Jaringan kadang hilang di daerah saya dan terkait biaya untuk menyiapkan Kouta internet, baik untuk kuliah daring maupun untuk mengerjakan tugas<sup>xviii</sup>”

Responden A15 berada di kota Palangka Raya pada saat survei di lakukan, permasalahan yang diungkapkan oleh responden cenderung pada keberadaan sinyal penyedia layanan yang digunakan dan kemampuan finansial untuk membeli pulsa atau kouta yang terlampau berat.

“Kendala dalam Kouta dan jadwal yang kadang dosen tidak sesuai jadwal saat memberikan tugas, bahkan bisa

dibilang bukan kuliah online yang terjadi, yang ada tugas setiap Minggu, kami pun kwalahan kalo dikebut dengan deadline yang begitu singkat, apalagi bagi yang tidak ada leptop mesti keluar rumah untuk pergi ke warnet kalo tidak seperti itu nilai akan menjadi taruhannya<sup>xix</sup>”

“Fasilitas kuliah daring, seperti laptop saya yang rusak dan hanya menggunakan handphone untuk mengerjakan tugas sekaligus untuk mengikuti perkuliahan online, dan kuota internet yang terbatas di tambah lagi jaringan internet yang terkadang kurang mendukung membuat kurang maksimal mengikuti perkuliahan. Dan juga saat mengikuti kuliah daring dari rumah kurang fokus karna saya punya adik kecil yang belum mengerti, selalu ingin bermain dengan saya. Biasanya pun saya mengikuti perkuliahan online menggunakan handphone milik ibu saya, dan handphone milik saya, saya gunakan untuk membuka materi perkuliahan<sup>xx</sup>”

“Terkadang listrik yang sering padam dengan waktu yang tidak menentu menjadi penghambat karena otomatis jaringan akan hilang karena beberapa kali saat kuliah daring saya menjadi tak bisa ikut, tak menentu nya dosen masuk karena tidak mesti kami selalu stand by memegang handphone, ada beberapa dosen yang memberikan tugas dengan daring tetapi membebankan mahasiswa untuk juga mengumpulkan tugas fisiknya ditengah keadaan seperti sekarang<sup>xxi</sup>”

“Kendalanya adalah kuliah online tidak seefektif kuliah tatap muka yang dengan begitu bisa lebih leluasa untuk bertanya, kadang2 bertanya pun

dosennya berhari hari baru bisa balas, kadang selalu di berikan tugas yang susah dan sangat butuh penjelasan langsung dari dosen<sup>xxii</sup>”

Permasalahan yang terdeskripsi pada masa perkuliahan semester genap 2019/2020 melalui pernyataan beberapa responden mahasiswa tersebut merupakan sebuah realitas yang tidak diabaikan begitu saja. Bagaimanapun persoalan ini menyangkut bagaimana Politik Pendidikan yang diimplementasikan oleh Negara untuk menghadapi Pandemi Covid 19. Masalah klasik seperti sinyal, kuota yang mahal, minimalnya fasilitas belajar yang dimiliki secara pribadi atau yang disediakan oleh jurusan justru menjadi persoalan yang harus segera di selesaikan melalui proses dialog dan diskusi dengan dosen pengampu Mata Kuliah yang bersangkutan.

Pengaturan permasalahan klasik yang berhasil diakomodir pada masa perkuliahan Genap 2019/2020 secara tidak langsung meningkatkan kemampuan komunikasi mahasiswa pada suatu jurusan. Hal ini tepatnya dalam memberikan penjelasan kepada lembaga berkaitan dengan kondisi mahasiswa. Kemampuan komunikasi krusial lainnya adalah memicu mahasiswa untuk bisa memahami lingkungan sekitar dan turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial yang ada di lingkungan terdekat mereka.

Berbagai macam permasalahan yang muncul dalam perkuliahan Genap 2019/2020 pada masa Pandemi Covid 19 cukup untuk menghasilkan kebijakan baru yang ditetapkan di dalam lingkup Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Politik UPR. Kebijakan baru tersebut disandarkan pada beberapa permasalahan yang terjadi ketika masa perkuliahan daring diantaranya adalah:

1. Banyak perkuliahan di Jurusan Ilmu Pemerintahan yang tidak terlaksana
2. Ada dosen yang kesulitan untuk melaksanakan perkuliahan daring

3. Mahasiswa dengan berbagai alasan mereka
4. Presensi pada semester Ganjil 2019/2020 hanya sebagian kecil yang ada sehingga membuat Jurusan Ilmu Pemerintahan Kesulitan untuk mengetahui kehadiran mahasiswa.

Selanjutnya muncul keinginan dari Fakultas bahwa setiap Jurusan di FISIP untuk memfasilitasi link-link perkuliahan virtual (salah satu yang banyak digunakan seperti Link Zoom) tersendiri. Keinginan ini untuk mengakomodir perkuliahan pada semester Ganjil 2021/2022 untuk melaksanakan perkuliahan dan dijelaskan pula bahwa permasalahan jaringan di Lingkungan FISIP yang belum memadai, hal ini terbukti dari rapat yang dilaksanakan selama 2 jam 30 menit terjadi gangguan sinyal di Lingkungan Fakultas.

## 2. Adaptabilitas Dosen dan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP UPR

Berbagai macam kendala teknis pada perkuliahan semester Genap 2019/2020, dianggap sebagai kondisi awal (*baseline*) dari realitas yang terjadi di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UPR, situasi pandemi covid 19 ini melahirkan banyak pilihan dengan memperhitungkan segala kemungkinan dari dunia kehidupan untuk memperbaiki pola belajar, koordinasi dan kolaborasi antara Jurusan, Dosen, Tenaga Pendidik dan Mahasiswa. Pandemi covid secara langsung menguatkan ikatan dalam pertukaran argumentasi untuk mencapai kebaikan bersama. Paduan antara representasi negara dengan masyarakat dalam ekosistem Jurusan Ilmu Pemerintahan memicu bagian dari ekosistem ini untuk menyesuaikan diri, beradaptasi dalam memberikan potensi terbaiknya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiswa, rekan kerja dan Bangsa dan Negara.

Proses adaptasi pembelajaran daring yang dilaksanakan selama satu semester,

perlahan mulai disesuaikan dengan ada berbagai kebijakan, pelatihan dan pembelajaran yang dilakukan di lingkup jurusan, Fakultas dan Universitas sebagai representasi dari negara. Pembelajaran daring kemudian menghadirkan privasi dan sekaligus publikasi secara bersamaan. Pembelajaran daring kemudian menjadi sarana elaborasi pemikiran melalui sudut pandang masing-masing, ruang-ruang publik tercipta, kreatifitas diadu dan kompetensi soft skill ditingkatkan baik dari dosen dan mahasiswa. Pembelajaran daring memungkinkan terbukanya suatu area yang bisa diakses secara luas tidak terbatas seperti ruang kelas konvensional.

Adaptabilitas dalam artikel ini adalah kemampuan adaptasi yang dimiliki oleh dosen dan mahasiswa dalam memenuhi perkuliahan daring pada masa Pandemi Covid 19. Kemudahan akan sarana dan platform perkuliahan diperbanyak dan diperluas. Capaian Pembelajaran dari mata kuliah pun kemudian dibuat lebih spesifik untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk dapat beradaptasi terhadap situasi dan mampu menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Dan yang terpenting dari semua ini adalah perkuliahan bisa tersampaikan dengan baik, dan Nilai Capaian minimum terpenuhi dengan bertanggung jawab, terdata dan dilaporkan ke Jurusan.

Pandemi Covid 19 memaksa mahasiswa untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya tidak hanya untuk cepat beradaptasi dengan lingkungan tersebut, tetapi juga untuk memenuhi proses perkuliahan yang diarahkan lebih empirik dan membumi. Adapun proses pemantauan kemampuan mahasiswa untuk memenuhi perkuliahan daring dilaksanakan dengan menggunakan media yang bervariasi seperti pembuatan video, kerja kelompok daring dan presentasi daring. Hal ini dirasa memadai untuk membentuk mahasiswa yang humanis dan bermoral.

## KESIMPULAN

Realitas perkuliahan daring di semester genal 2019/2020 dan proses adaptasi pembelajaran di semester ganjil 2020/2021. Merupakan kenyataan yang harus di hadapi bersama, belum adanya standar baku terkait perkuliahan daring namun dapat disiasati dengan memunculkan standar minimum pemenuhan perkuliahan dan standar maksimum, sehingga masing masing elemen dari ekosistem di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UPR. Pada akhirnya menjadi bagian dari ekosistem sebuah lembaga pendidikan memberikan pelajaran bahwa teknologi merupakan bagian yang penting untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

### Notes:

Baca Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid 19 Pada Satuan Pendidikan

Skocpol, T., Evans, P., & Rueschemeyer, D. (1985). *Bringing the state back in* (p. 3).

Mitchell, T. (1991). *The limits of the state: Beyond statist approaches and their critics*. *The American political science review*, 77-96.

Cf. Peter Evans et al. (eds.), *Bringing the State Back In* (New York, Cambridge University Press, 1985), Stephen Krasner, *Defending the National Interest* (Princeton, Princeton University Press, 1980), and Peter Katzenstein (ed.), *Between Power and Plenty* (Madison, University of Wisconsin Press, 1978).

Ryabov, V. V., Ananishnev, V. M., Ivanov, A. V., Tkachenko, A. V., Merkushin, V. I., & Akhtyan, A. G. (2019). Modern study of student's social adaptation phenomenon in large university educational complexes. *EurAsian Journal of BioSciences*, 13(2), 2343-2348.

Layanan Internet publik seperti wifi id

Layanan internet privat atau menumpang wifi orang lain.

300 adalah jumlah responden, yang terdiri atas mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan yang mengisi kuesioner dengan valid pada tanggal 28 April 2020

Deskripsi alasan responden A67

Deskripsi alasan responden A116 karena di wilayahnya listrik hanya menyala dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore.

Responden A5

Beberapa wilayah Gunung Mas ada beberapa desa yang belum tercover internet, berdasarkan pengalaman penulis

Responden A15

Responden A102

Responden A104

Responden A278

Responden A33

- Kebudayaan No 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid 19 Pada Satuan Pendidikan
- vi Skocpol, T., Evans, P., & Rueschemeyer, D. (1985). *Bringing the state back in* (p. 3).
- vii Mitchell, T. (1991). *The limits of the state: Beyond statist approaches and their critics*. *The American political science review*, 77-96.
- viii Cf. Peter Evans et al. (eds.), *Bringing the State Back In* (New York, Cambridge University Press, 1985), Stephen Krasner, *Defending the National Interest* (Princeton, Princeton University Press, 1980), and Peter Katzenstein (ed.), *Between Power and Plenty* (Madison, University of Wisconsin Press, 1978).
- ix Heru Purnomo, CNBC Indonesia 3 Februari 2020, Kontroversi Kebijakan 100 Hari Menteri Nadiem Makarim Available Online at <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200203105122-4-134677/kontroversi-kebijakan-di-100-hari-menteri-nadiem-makarim> Diakses pada tanggal 20 Oktober 2020
- x Ryabov, V. V., Ananishnev, V. M., Ivanov, A. V., Tkachenko, A. V., Merkushin, V. I., & Akhtyan, A. G. (2019). Modern study of student's social adaptation phenomenon in large university educational complexes. *EurAsian Journal of BioSciences*, 13(2), 2343-2348.
- xi Layanan Internet publik seperti wifi id
- xii Layanan internet privat atau menumpang wifi orang lain.
- xiii 300 adalah jumlah responden, yang terdiri atas mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan yang mengisi kuesioner dengan valid pada tanggal 28 April 2020
- xiv Deskripsi alasan responden A67
- xv Deskripsi alasan responden A116 karena di wilayahnya listrik hanya menyala dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore.
- xvi Responden A5
- xvii Beberapa wilayah Gunung Mas ada beberapa desa yang belum tercover internet, berdasarkan pengalaman penulis
- xviii Responden A15
- xix Responden A102
- xx Responden A104
- xxi Responden A278
- xxii Responden A33